**BAB II**

**TINJAUAN PENGUNGSI SURIAH**

1. **Dinamika Suriah**
2. **Suriah Pasca Kemerdekaan**

Politik Suriah pasca perang penuh dengan kekerasan dan perubahan mendadak. Lebih dari tiga tahun sesudah kemerdekaan Suriah, pemerintah dikuasai oleh para pemimpin blok nasional, Shukri al Quwatli, Jamil Mardam Bey, Saadullah al-Jabri, dan kawan-kawannya yang mempunyai andil besar dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerderdekaan negaranya, generasi tua ternyata tidak cocok untuk tugas dan pembaharuan pasca perang. Kritik bermunculan yang menuduh para pemimpin blok nasional hanya memperhatikan kepentingan pribadi. Pemilihan umum pertama, dalam kemerdekaan Suriah (Juli 1947), dilaksanakan lebih jujur dibandingkan dengan di Lebanon. Sebelumnya juga mereka mengeluarkan protes keras melawan campur tangan pemerintah. Pada tahun 1947 mayoritas propemerintah mengamandemen konstitusi yang mengizinkan pemilihan ulang presiden untuk kedua kalinya. Pada bulan April 1948 Majelis menggunakan hak ini. Pada pemilihan ulang, Shukri al-Quwatil menjadi presiden Republik.[[1]](#footnote-1)

Karena setia kepada prinsip republikanisme (yang filsafat politiknya hampir sesuai dengan sistem liberal abad kedelapan belas), para pemimpin blok nasional menyadari bahwa kekuatan posisi yang di miliki mereka tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan Suriah dan keterpisahannya sebagai sebuah negara. Itulah sebabnya mereka menentang rencana-rencana penyatuan dunia Arab yang akan mengakibatkan munculnya Suriah yang lebih besar dan mungkin sebagai negara monarki. Mereka khususnya menentang rencana Suriah raya yang dianjurkan oleh kerajaan-kerajaan Hashimiyah Transyordania, dan Palestina. Akan tetapi, bukan hanya Raja Abdullah yang mendukung rencana ini, Partai Nasional Suriah pimpinan Saadeh juga menganjurkannya. Ia juga disokong oleh kelompok Konstitusionalis dari Allepo, yang pada tahun 1948 bersama Partai rakyat, yang menarik banyak politikus moderat dan memperluas aktivitasnya ke semua bagian Suriah. Namun, kelompok ini tidak menyokong Raja Abdullah untuk calon raja.[[2]](#footnote-2)

Mungkin rezim Quwatli melanjutkan kekuasaan untuk periode yang tidak pasti apabila tidak terdapat masalah Palestina. Kecanggungan perang Palestina pada tahun 1948 oleh pemerintah Quwatli-Mardam-Bey mengakibatkan ketidakpastian dan antipasti umum. Hal ini menunjukkan kelemahan pemerintah yang disebabkan oleh kekacauan dan kerusuhan (Desember 1948) yang menimbulkan demonstrasi anti pemerintah yang secara spontan menggerakkan revolusi. Perdana menteri Jamil Mardam bey dipaksa meletakkan jabatannya. Hukum dan ketertiban berhasil dipulihkan oleh angkatan bersenjata, Kolonel Husni Zaim, yang dengan mengkombinasikan kekuatan dengan persuasi berhasil menyelamatkan Suriah dari perpecahan. Kegagalan pemerintah Suriah dalam Perang Palestina memperkuat cita-cita propersatuan yang menyatakan bahwa perluasan persatuan di antara negara-negara Arab dan kolaborasi yang erat dengan Irak dan Tranyordania bisa membalikkan bencana militer.[[3]](#footnote-3)

Tahun 1956 dan 1957 merupakan periode transisi dalam sejarah Suriah pascaperang. Pada tahun-tahun ini Suriah mengalami dua perubahan, perubahan radikal dalam kepemimpinan politik dan pembelokkan kebijakan nasional dari negara merdeka terpisah menjadi bersatu dengan Mesir. Dalam transisi ini berlangsung dalam tiga periode. Pertama (awal 1956), Partai Rakyat (Ash-Shaab) sangat dominan, kemudian turun, dan terpaksa membagi kekuatan dengan kelompok lainnya.. kedua (pertengahan 1956), masa berjayanya ofensif komunis dan Pan Arabis serta kekalahannya kelompok Konservatif. Ketiga (1957), klimaks revolusi, gagalnya Suriah menjadi satelit Uni Soviet, dan akhirnya menjadi seperti sebuah provinsi Republik Persatuan Arab.[[4]](#footnote-4)

Namun, Suriah kembali memperoleh kemerdekaannya setelah angkatan darat melakukan kudeta (28 Spetember 1961). Dengan demikian, Suriah dan Mesir menjadi negara terpisah kembali. Meskipun telah berhasil melepaskan diri dari cengkraman Mesir, pemerintah baru merasa perlu menjelaskan kepada rakyat di dalam negeri dan dunia arab secara keseluruhan. Baik kabinet maupun Komando Revolusi gencar menjelaskan pembenaran posisi mereka sambil melukiskan secara rinci penyalahgunaan rezim persatuan. Pernyataan ini diikuti dengan memorandum yang panjang dari Federasi Kamar Dagang dan Industri Suriah bahwa metode ekonomi Kairo telah merusak perdamaian Suriah. Karena khawatir bahwa Pan Arabisme akan membangkitkan kembali emosi rakyat, pemerintah mengimbau (Oktober 1961) kepada negara-negara Arab dengan mengusulkan pembentukan Konfederasi Arab yang akan memelihara sistem politik, ekonomi, dan militer setiap negara anggota. Kecuali Yordania, pada umumnya negara-negara Arab lainnya acuh tak acuh menanggapinya. Jadi proposal ini hanya dianggap sebagai alat propaganda Suriah. Meskipun Suriah telah berhasil melaksanakan prestasi besar dalam meraih kembali kedaulatannya, ia harus memecahkan banyak masalah dalam negeri yang rumit. Di antaranya masalah hubungan antara angkatan darat dan pemerintah sipil.[[5]](#footnote-5)

1. **Geopolitik Suriah**

Pada masa lalu Suriah merupakan istilah geografis bagi seluruh wilayah yang meliputi Suriah, Lebanon, Palestina dan Israel sekarang yang dahulu dikenal dengan nama wilayah Syam. Suriah atau yang dahulu dikenal sebagai Syam memiliki wilayah yang sangat luas di sebelah timur Laut Mediterania, wilayah ini yangLatar Belakang Timbulnya Pengungsi. kemudian dipecah oleh negara Barat menjadi beberapa negara yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina yang sebagiannya diakui sebagai Israel.8 Suriah merupakan negara yang menghubungkan tiga benua yaitu Eropa, Asia dan Afrika sehingga Suriah dikatakan sebagai jalur perdagangan, tempat terjadinya transfer budaya antarperadaban dan wilayah yang banyak diperebutkan berbagai dinasti dan imperium. Selain itu pada masa kekuasaan Islam, Suriah menjadi pusat kekhalifahan Islam yang menguasai wilayah dalam ruang lingkup yang lebih besar dari imperium Romawi mulai dari Perancis, Spanyol, Asia Tengah dan India.

Suriah merupakan salah satu peradaban paling tua di muka bumi, pada tahun 1975 para arkeolog di kota Ebila bagian Utara Suriah menemukan sebuah kerajaan yang sempat berdiri dan berkembang dari Laut Merah ke Turki dan Mesopotania pada 2500-2400 SM. Peradaban yang di wilayah ini dimulai dengan munculnya bangsa Funisia sebagai nenek moyang mereka yang menguasai wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1600 SM, wilayah Suriah pernah dikuasai oleh bangsa Mesir, dan dikuasai oleh bangsa Aramea pada tahun 1200 SM yang pada saat itu menamai wilayah kekuasaannya “Suriah” berasal dari kata *Syriac* dialek Aramea serta mendirikan kota Damaskus sebagai pusat kegiatan dan tempat tinggal masyarakatnya. Pada abad ke-6 SM, Suriah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Persia, yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Imperium Iskandar Agung yang telah berhasil menghancurkan kekuatan Kekaisaran Persia dan membuka jalan bagi penaklukan Suriah oleh Imperium Romawi. pada abad ke-4 SM. Terpecahnya Imperium Romawi pada abad ke-4 sesudah Masehi menjadikan Suriah berada dibawah kekuasaan Imperium Bizantium yang berpusat di Konstantinopel.[[6]](#footnote-6)

Namun, Suriah bukan Libya. Libya secara geografis jauh lebih besar dan sebagian besar kosong dengan populasi yang lebih kecil dan kemampuan militer sangat terbatas secara keseluruhan. Sebaliknya, penduduk Suriah lebih besar tiga kali dari Libya, memiliki kepadatan penduduk hampir 30 kali dan keseluruhan militer yang jauh lebih besar dan jauh lebih mampu. Libya memiliki perpecaha suku dan etnis secara terus-menerus. Namun, perpecahan sektarian dan etnis Suriah berjalan jauh lebih dalam dan beresonansi lebih jauh terutama ketegangan Sunni dan Syiah.

Tidak seperti di Libya, pasukan oposisi Suriah belum mengkonsolidasikan kontrol mereka atas wilayah strategis dan mereka saat ini tidak memiliki sumber daya militer yang cukup untuk melawan aparat militer dan keamanan rezim. Rezim Assad menikmati tingkat kontrol yang jauh lebih besar atas negara dari pada rezim Gadhafi, meskipun kontrol yang telah terkikis secara signifikan, terutama di provinsi-provinsi utara Idlib dan Aleppo. Sementara struktur negara Suriah tidak kuat dengan ukuran apa pun dan telah menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan pembusukan selama beberapa dekade, 40 tahun struktur negara Libya benar-benar hancur di bawah Gadhafi dan ada kemiripan hubungan negara-masyarakat.

Sementara itu, rezim Assad telah menunjukkan hal itu dapat mengandalkan jauh lebih dari unit militer praetorian dan penampang yang signifikan dari populasi Suriah, termasuk kelompok minoritas yang paling (baik karena takut atau karena pilihan) baik mempertahankan kepentingannya atau tidak untuk melemahkan rezim lebih jauh. Sementara itu, angkatan bersenjata tetap setia terdapap rezim Assad.

Segmen penting dari pasukan keamanan sebagian besar tetap setia dalam merekrut terutama dari masyarakat Alawite pedesaan, yang telah menghasilkan budaya korporatis militer yang kuat. Sementara pasukan oposisi bersenjata Libya terpecah, Suriah jauh lebih terpecah, dengan persatuan sedikit atau kesepakatan tentang ideologi, meningkatnya peran pasukan Islam dan Jihad, dan perselisihan tentang peran potensial dari intervensi asing. Tidak seperti Libya, Suriah mempersulit kalkulus aktor eksternal berdasarkan perpecahan sektarian dan etnis. Dengan beberapa perkiraan, penduduk Suriah termasuk 74 persen Muslim Sunni, 10 persen berbagai kelompok Kristen, dan masyarakat Alawite dan akun Druze untuk 16 persen sisanya. Sementara itu, akun Arab untuk beberapa 90,3 persen dari populasi, sementara Kurdi, Armenia dan kaum minoritas lainnya tersisa 9,7 percent.[[7]](#footnote-7)

Posisi Suriah ternyata sangat strategis baik bagi negara tetangga maupun negara adiidaya yang sudah diicar sejak dulu untuk kepentingan bisnis maupun militer. Pertama kali diusulkan oleh Qatar pada tahun 2009, yaitu mega proyek pipa gas alam yang akan dijalankan melalui Suriah Aleppo dan Turki kepada Eropa. Namun, Assad menghancurkan mimpi ini pada 2011 ketika ia malah memilihperjanjian dengan Irak dan Iran untuk menjalankan proyek "pipa Islam" melalui arah timur ke pasar Eropa.[[8]](#footnote-8)

Gambar 2.1 Mega Proyek Migas Turki-Qatar Pipa.



Sekarang kebetulan, di sekitar wilayah Aleppo juga di mana Turki diusulkan AS untuk mendirikan zona penyangga untuk memasok pasukan "pemberontak moderat”.

Gambar 2.2 Usulan Zona Penyangga Suriah



Jika Kurdi telah terhubung di sepanjang perbatasan Turki dan membentuk daerah otonom, rencana untuk pipa Qatar-Turki melalui Arab Saudi akan benar-benar hancur. Hal ini tidak mengherankan bahwa para pejabat Turki menarik garis dari Aleppo ke Ayn al-Arab sebagai zona penyangga dan AS setuju untuk tuntutan mereka.

ISIS juga bermanfaat dari serangan aggresif Turki terhadap PKK-sepatu yang paling efektif di tanah pertempuran ISIS. Dipersatukan oleh kebencian mereka dari suku Kurdi, Turki juga duduk kembali dan menyaksikan ISIS menyerang YPG di Ayn al-Arab tahun lalu.

Menulis di Angkatan Bersenjata Journal4, Mayor Rob Taylor bergabung dengan banyak pakar lain dalam mengamati bahwa perang sipil Suriah sebenarnya perang alih kendali pipa pasokan energi, dengan Arab Saudi, Qatar dan Turki perlu untuk menghapus Assad "sehingga mereka dapat mengontrol Suriah dan menjalankan pipa mereka sendiri melalui Turki.

Arab Saudi dan Qatar, serta al Qaeda dan kelompok-kelompok lainnya, sedang melakukan manuver untuk menggulingkan Assad dan memanfaatkan mereka berharap-untuk penaklukan Sunni di Damaskus. Dengan melakukan ini, mereka berharap untuk mendapatkan bagian dari kontrol atas pemerintah Suriah 'baru', dan saham dalam kekayaan pipa. "Bahkan jika itu termasuk Turki diam-diam mendukung ISIS terhadap Assad.

Jadi, bahkan jika Saudi / Qatar / Turki didukung Tentara Penakluk dapat mengendalikan lahan cukup di Suriah bagi salafi untuk membangun pipa Qatar-Turki, maka negara sunni ini akhirnya bisa mewujudkan impian pipa mereka. Memang, laporan Badan Intelijen Pertahanan 2012 menguatkan keinginan mereka untuk mengukir statelet salafi di Suriah timur dari wilayah yang dikendalikan Assad untuk menekan dia. (Pada 2012 itu lebih ke timur, tapi sekarang bahwa Assad telah kehilangan banyak wilayah yang hanya bagian timur dari Latakia).

Pertama, jihadis yang bertanggung jawab atas Suriah akan berarti kepunahan lebih lanjut dari Kristen Timur Tengah, serta genosida agama lainnya dan etnis minoritas.

Kedua, moral legitimasi AS dan NATO akan terkikis dengan benar atau salah, dianggap oleh dunia non-Barat terlibat dalam mendukung al Qaeda sebagai kelompok teroris dan penganiayaan terhadap minoritas agama.

Ketiga, kredibilitas AS sebagai sekutu akan lebih menimbulkan korosi terutama karena Washington telah mengkhianati Kurdi lebih dari sekali. Terlebih, ahli keamanan AS memperingatkan sekutu seperti Korea Selatan dan Japan untuk lindungi diri mereka sendiri dan membangun senjata nuklir karena hilangnya kepercayaan jaminan keamanan AS.

Selain itu, karena beberapa sarjana Cina dinilai, Suriah / Turki akan menjadi AfPak baru dengan tempat yang aman bagi para pelaku jihad salafi untuk mendapatkan kekuasaan dan memulai serangan di tempat lain, seperti yang didukung Barat Mujahidin Afghanistan berubah menjadi al Qaeda dan terus menyerang barat.

Bahkan, politisi Jerman Cem Özdemir sudah menyebut Turki "mini-Pakistan" dan Berlin telah mengeluarkan travel advisory, mengikuti langkah China setelah protest kekerasan anti-Cina pecah pada Juli. Akhirnya, risiko eskalasi ini menjadi konflik kekuatan besar dengan menarik Cina, Rusia dan Iran ke Suriah.

Kepentingan Iran dalam mempertahankan Assad sudah didokumentasikan dengan baik, dan karena bagi Rusia, pipa Qatar-Turki ke Eropa langsung menantang posisi dominan Rusia sebagai pemasok energi. Itulah sebabnya Pangeran Saudi Bandar bin Sultan mencoba meyakinkan Putin untuk meninggalkan Assad dan berjanji bahwa rezim apa pun yang datang setelah" Assad, itu akan menjadi benar-benar di tangan Arab Saudi dan akan "tidak menandatangani perjanjian yang mengizinkan negara Teluk untuk mengangkut gas di seluruh Suriah ke Eropa dan bersaing dengan ekspor gas Rusia. Meskipun demikian Putin menolak, dan Pangeran bersumpah akan melancarkan aksi militer.

Kepentingan Cina juga dirugikan karena link pemberontak Uyghur dengan pemberontak anti-Assad Turki, mengancam Xinjiang pemisahan dan menghancurkan permata mahkota dan kepala jembatan sutra grand strategy Xi Jinping.

Turki / Qatar / didukung Saudi Tentara Conquest termasuk kelompok teror yang dipimpin Uyghur China, Turkistan Partai Islam (TIP), bahwa pada bulan April bergabung al-Qaeda afiliasi Jabhat-al-Nusra (JN), yang dipimpin Uzbek Imam Bukhari Jamaat dan Katibat Tawhid wal Jihad untuk mengalahkan tentara Suriah di Jisr al-Shughur di barat laut Suriah Idlib gubernuran.

Sebagai koalisi pemberontak seperti sekarang memiliki jalur suplai langsung buka dari Turki Hatay Province untuk Idlib, lebih diperluas dengan zona penyangga baru yang diajukan. pakar kontra-teror Jacob Zenn menilai bahwa "pemberontak mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mendirikan negara de-facto di barat laut Suriah yang dipimpin oleh JN dan didukung oleh beberapa militan Asia Tengah."

negara de facto ini merupakan ancaman keamanan serius bagi Cina sebagai tempat yang aman bagi kelompok-kelompok militan untuk melancarkan serangan di depan rumah, terutama dengan pengungkapan baru-baru ini oleh pejabat keamanan China bahwa Turki telah menerbitkan paspor palsu untuk merekrut orang Uyghur China untuk kelompok anti-Assad.

TIP telah mengklaim banyak serangan profil tinggi teroris terhadap China selama dua tahun terakhir, termasuk Kunming serangan stasiun kereta api yang menyebut Beijing nya 9/1116. Kerajaan Tengah di masa lalu telah mengancam dukungan untuk PKK sebagai pengaruh atas dukungan Turki kepada separatis Uighur. Sebab Turki terus mendukung militan Uighur dan menyerang PKK, itu akan menarik untuk melihat apakah permainan Kaisar Xi dilapangan dan memutuskan untuk mempersenjatai PKK melalui strategi Jie Dao Sha ren (借刀殺人), atau membunuh dengan pinjaman pedang.[[9]](#footnote-9)

1. **Latar Belakang Konflik Suriah**

Pada bulan Januari 2011 protes meletus di Mesir terhadap Presiden Hosni Mubarak. Saat itu adalah jatuhnya Presiden Tunisia Zeinelabidin Bin Ali pada 14 Januari 2011 oleh protes populer yang mendorong para pemuda Mesir untuk mengorganisir diri dan turun ke jalan menuntut pelepasan Mubarak. Beberapa minggu kemudian, protes pecah di Libya, Yaman, dan Suriah. Peristiwa ini memaksa AS untuk mengatur ulang rencananya terutama untuk meminimalkan kerusakan pada kepentingan strategis Amerika. Para demonstran Suriah memiliki motif kuat untuk ketidakpuasan mereka dengan rezim. Setelah lima dekade pemerintahan Partai Baath, orang Aram sudah muak dengan korupsi yang merajalela dan nepotisme, dan kurangnya kebebasan sipil dan politik. Setelah satu dekade berkuasa, Bashar al-Assad berusaha untuk mereformasi rezim, tapi jumlah pemilih terbatas. Dia memperkenalkan serangkaian reformasi liberal ekonomi yang menguntungkan kelas atas, dan terutama mereka yang dekat dengan rezim. Selain itu, ia membuka pasar untuk impor, terutama dari Turki, dengan mengorbankan ekonomi lokal. Ini menggerogoti dukungan bagi rezim di antara kelas menengah bawah dan daerah pedesaan, yang membuatnya berbalik melawan pemerintah Suriah. Kebijakan assad.

AS, bersama dengan Qatar dan Arab Saudi, mendukung dan membiayai kelompok neo-Salafi yang merupakan bagian dari demonstrasi yang meletus di Suriah dan menyoroti wacana sektarian, dicontohkan, oleh serangan dari seorang syekh Salafi di kota Deraa di Druze. Mereka memicu gelombang kampanye kebencian anti-minoritas yang menargetkan Syiah, Alawi dan Christians. Hal ini cukup untuk mengingat bahwa kota Suriah selatan Deraa adalah kota besar di Hauran yang membentuk perpanjangan geografis alam Jordan, dan akibatnya terbuka untuk efek sosial-politik yang berasal dari Semenanjung Arab. Selanjutnya, Lebanon 14 Maret koalisi politik, didominasi oleh Gerakan Masa Depan berbasis Sunni-didukung dana dan senjata pemberontakan di Suriah. Gerakan ini, yang dipimpin oleh Lebanon mantan perdana menteri Saad Hariri, memiliki pengikut yang besar di daerah-daerah Sunni seperti Akkar di Libanon utara, di Bekaa tengah dan selatan, dan di kota-kota pesisir. Bagian utara Lebanon menjadi sarang bagi neo-Salafi yang memberikan dukungan penting bagi para pemberontak Suriah. Intelijen militer Lebanon menangkap empat orang yang menyelundupkan senjata ke Suriah, dan muatan kapal senjata itu dicegat dalam perjalanan dari Tripoli ke pesisir Suriah. Bersamaan, Kurdi Irak mendorong saudara-saudara mereka di Qamishli, Al Hasaka dan Boukamal di timur laut Suriah memberontak terhadap rezim. Khususnya, pihak berwenang Suriah mencegat banyak senjata yang diselundupkan dari Irak ke Syria. Dayr El Zor, sebuah kota di Suriah timur, yang penghuninya berbagi ikatan kekeluargaan dengan orang-orang dari Irak tengah, juga menyaksikan demonstrasi dengan partisipasi neo Salafi. AS melihat dalam protes itu kesempatan untuk menekan Bashar al-Assad. Presiden Barak Obama, dalam pidato pada revolusi Arab, menyerukan Bashar al-Assad untuk 'memimpin reformasi di negaranya atau mengundurkan diri' dan terlebih lagi, dia memperingatkan al-Assad bahwa 'Menekan protes dapat menyebabkan intervensi internasional.

Turki adalah salah satu negara yang paling terkena dampak oleh situasi eksplosif di Suriah dan menyerukan Presiden Suriah untuk memulai proses reformasi yang akan mengakibatkan hak-hak politik dan sipil lainnya setelah lima dekade Baath pemerintahan otoriter. Menteri Turki urusan luar negeri, Ahmet Davutoglu, bergegas untuk mengunjungi Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad pada awal krisis untuk mengekspresikan kehendak negaranya untuk membantu dalam process ini. Ini Penting untuk menyebutkan bahwa minggu pertama protes tidak menyaksikan setiap perkembangan politik yang signifikan di kota-kota Suriah dan kota-kota yang berdekatan dengan perbatasan Turki. Namun, hal-hal tersebut mulai berubah pada bulan Mei dan Juni 2011 sebagai Perdana Menteri Turki, Recep Tayyep Erdogan mengumumkan bahwa "kengerian yang dilakukan di Suriah tidak dapat dimaafkan", menyerukan al-Assad untuk menangkap saudaranya Maher, yang dianggapnya sebagai "yang bertanggung jawab menghentikan pemberontakan". Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa 'jika kengerian mereka terus berlanjut, Turki tidak akan membela Suriah terhadap tekanan yang akan diberikan oleh "masyarakat internasional".

Kemudian Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa al-Assad memiliki satu minggu untuk memulai dengan reformasi, atau masyarakat internasional akan campur tangan dalam Syria. Pembicaraan beredar tentang niat Turki untuk memberlakukan "zona keamanan" di Suriah utara memunculkan kepentingan geostrategis yang ditetapkan oleh Davutoglu dalam bukunya. Setelah itu, ketegangan di Suriah utara mulai meningkat dengan peristiwa di Jisr Al-Shoghoor, di mana kelompok-kelompok bersenjata menewaskan 120 personel keamanan. Zona keamanan di Suriah utara, yang disarankan oleh Davutoglu, disalin zona keamanan akhir yang ditetapkan oleh mantan Preisdent Turki Turgut Ozal awal 1990-an untuk melawan Partai Buruh Kurdi (P.K.K.) pemberontak. Sudah jelas bahwa para pejabat Turki sedang mencari untuk memainkan peran di Dunia Arab melalui intervensi di Suriah secara konsisten dengan kebijakan strategis Amerika di Timur Tengah. Strategi yang bertujuan untuk memperluas pengaruh Turki ke selatan untuk terhubung dengan Jordan dan Teluk Persia, sehingga pantai Mediterania akan ditutup untuk setiap infiltrasi Iran, Rusia atau Cina. Strategi ini juga telah menyatu dengan kebijakan Prancis, yang didasarkan pada drive tradisional Prancis untuk mengontrol wilayah pesisir Suriah. Hal ini menjelaskan seruan dari kementerian luar negeri Perancis di PBB dan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Suriah, seruan itu diadopsi oleh Portugal, Inggris, dan Jerman[[10]](#footnote-10)

Kepemimpinan Bashar diharapkan dapat memberikan perubahanperubahan pada bidang perbaikan ekonomi, sistem politik, dan birokrasi. Menjelang berlangsungnya kepemimpinan Bashar al-Asad, telah beredar kabar bahwa akan ada perbaikan di bidang ekonomi dan sistem politik. Pada kedua bidang tersebut, Bashar mengerahkan dukungan penuh dan mempererat kekuasaannya.

Perbaikan ekonomi yang Bashar al-Asad canangkan pada awal penobatannya sebagai presiden, tetap ia laksanakan. Namun, kerja kerasnya dalam memperbaiki perekonomian dalam negeri hanya dirasakan oleh mereka yang dekat, memiliki hubungan, serta ikatan keluarga dengan rezim. Tekadnya untuk memberantas korupsi hanya sampai pada pidato-pidato awal pemerintahannya saja[[11]](#footnote-11)

Bashar mewarisi sistem politik satu partai, yang didominasi oleh militer yang beraliran sekte Alawi. Sistem tersebut terdiri dari pemerintahan resmi dan pemerintahan bayangan. Pada pemerintahan resmi, terdapat institusi seperti kabinet, parlemen, kepengurusan partai Ba‟ath, dan beberapa partai kecil. Keputusan yang sebenarnya dibuat dibelakang pemerintahan resmi tersebut, pada sebuah golongan kecil yang berisikan kepala pemerintahan yang bertugas untuk memelihara kestabilan rezim. Hanna Batatu, seorang ahli sejarah Timur Tengah, mengemukakan bahwa 61% dari pemerintahan bayangan tersebut menganut sekte Alawi. Pemerintahan bayangan ini memberikan jawaban kepada presiden yang bersifat mutlak. Orang-orang yang berada di luar area pemerintahan dapat tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan tenang selama mereka tidak ikut campur dalam keputusan politik.

Dari sudut pandang ekonomi politik, pada bagian hak istimewa di dalam lapisan strata sosial Suriah, sistem ekonomi di Suriah di dominasi oleh tiga golongan; pertama, pemimpin di sektor publik, kedua pengusaha kelas kecil, ketiga pelindung kegiatan mereka yaitu dari kalangan keamanan dan elit militer. Siapa pun yang bekerja sebagai aparat negara tidak dapat tersentuh dari hukum, sehingga dapat memperkaya diri. Hal tersebut dibiarkan oleh mendiang presiden, Hafiz al-Asad, untuk kalangan yang telah setia kepadanya, dan sanggup untuk melakukan segala cara untuk memelihara keamanan dan stabilitas rezim. Contoh penerapan dari pemeliharaan keamanan pada era Hafiz al-Asad adalah pada tahun 1982 ketika pasukan keamanan dan elit militer, membombardir kota Hama, yang menelan ratusan warga sipil.[[12]](#footnote-12)

Setelah enam bulan semenjak pelantikannya sebagai presiden, dan segala perubahan yang ia setujui, Bashar al-Asad berubah pikiran. Masa sebelum Bashar menjabat kembali berlangsung. Forum-forum diskusi dibatasi dan harus mengikutsertakan petugas keamanan. Siapapun yang ingin menyelenggarakan pertemuan-pertemuan harus mengurus izin seminggu sebelumnya, dan menyertakan informasi tentan topic pembicaraan, pembicara, tamu undangan, dan materi pembicara.

Pasca pencabutan segala permohonan yang dilayangkan dalam petisi maupun surat terbuka oleh rakyat, kepemimpinan Bashar al-Asad berubah dari image pembawa perubahan menjadi sama dengan kepemimpinan mendiang Hafiz al-Asad, diktatoris. Gerakan tersebut belakangan dikenal dengan “Damaskus Spring” kurang mendapat antusiasme dari mayoritas rakyat Suriah. Misi gerakan tersebut tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Suriah yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Gerakan tersebut juga hadir bersamaan dengan pecahnya Intifada kedua di Palestina. Para intelektual penggagas petisi dan surat terbuka mengusung gagasan-gagasan Barat, suatu hal yang bertentangan dengan semangat anti-Israel dan Barat terebut. *Damaskus spring* dengan umur yang pendek, namun mampu menginspirasi lahirnya partai-partai oposisi di pengasingan di luar Suriah. Salah satunya adalah Partai Pembaharuan Suriah atau *Hizb al Islah al-* *Suri,* yang didirikan oleh seorang pengusaha Amerika-Suriah, Farid Nahid al-Ghadiri.

Akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, disaat negara-negara Arab lain dipenuhi dengan pemberontakan, aksi-aksi demo, dan upaya penggulingan rezim berkuasa di negara-negara tersebut, Suriah merupakan negeri yang lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa rezim Asad dan Suriah tidak akan tersapu angin gelombang revolusi Arab Spring.

Rezim Asad membangun pemerintahan dengan menempatkan tentara baik sebagai simbol kekuasaan maupun sebagai suatu alat untuk mengontrol negara.73 Dalam beberapa kesempatan, tentara digunakan untuk menekan atau menghadapi rakyat dengan kekerasan demi mempertahankan stabilitas politik. Rezim ini pun dibangun diatas empat pilar: pertama, kekuasaan di tangan klan al-Asad. Kedua, rezim ini mempersatukan kaum minoritas Alawi. Ketiga, mengontrol seluruh aparatur militer intelijen. Keempat, monopoli partai Ba‟ath atas sistem politik. Faktor lain yang dianggap sebagai sistem kekebalan bagi Suriah dari gelombang *Arab Spring* adalah sikap pemimpinnya yang anti Barat dan dukungannya terhadap Palestina. Posisi tersebut dianggap menguntungkan rezim yang berkuasa dan mengukuhkan keyakinan rakyatnya. Posisi strategis kaum Alawie di Suriah turut menjaga keberlangsungan pemerintahan rezim Asad. Dari 200.000 tentara militer di Suriah, 70 persen merupakan Alawie.

Sekitar 80 persen perwira militer Suriah pun Alawie. Dan divisi paling elit di militer Suriah, Garda Republik, dipimpin oleh adik lakilaki Bashar, Maher al-Asad.74Penempatan orang-orang kepercayaan rezim al- Asad juga diperhitungkan dalam menjaga stabilitas rezim. Untuk menghindari pembelotan oleh angkatan udara yang sebagia pilotnya adalah Sunni, orangorang Alawie ditempatkan di bagian logistik, komunikasi, perawatan pesawat, serta intelijen angkatan udara. Peristiwa *Arab Spring* serta kejatuhan para pemimpin negara Timur Tengah berhembus kencang hingga sampai ke rakyat Suriah. Semangat yang ditularkan para aktivis dan demonstran di Tunisia dan Mesir melalui video yang diunggah ke *Youtube* dan berbagai seruan perlawanan terhadap rezim di media sosial belum mampu menembus kekebalan yang dimiliki rezim al-Asad karena pihak keamanan menekan para aktivis tersebut agar tidak melakukan demonstrasi jika tidak ingin kejadian di Hama pada tahun 1982 terulang.[[13]](#footnote-13)

Pada bulan Mei 2013, kekerasan di Suriah terus meningkat. Tidak ada tanda-tanda mengakhiri konflik dan manusia menderita setelah dua tahun lalu sebagian besar dari gerakan protes damai di pinggiran negara bertemu dengan represi brutal. Janji-janji kosong reformasi yang dibuat oleh rezim tidak punya substansi atau kredibilitas, dan situasi dengan cepat merosot menjadi pemberontakan bersenjata. Sementara pemberontak telah membuat kemajuan yang signifikan dan rezim telah menarik pasukannya dari hampir setengah wilayah negara, pemberontak dan PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat atau Uni Demokratik Partai, versi Suriah PKK, Partiya Karkerên Kurdistan atau Kurdistan Partai Buruh), yang masing-masing memegang bagian dari tanah ini, tidak mampu secara lengkap dan kontrol berkelanjutan dari salah satu kota besar atau melindungi penduduk sipil pada daerah yang dibebaskan dari wilayah udara rezim, artileri dan serangan rudal.

Sebagai konsekuensi dari pertempuran, sekitar 70.000 orang tewas, puluhan ribu ditangkap, sekitar seperempat dari populasi Suriah telah melarikan diri dari kekerasan - Baik ke daerah yang lebih aman di dalam negeri (dengan beberapa 3,8 juta Internally Displaced Persons - Pengungsi) atau di luar, terutama ke negara-negara tetangga (sekitar 1,4 juta pengungsi terdaftar atau menunggu pendaftaran oleh PBB, dan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi). Disamping itu, diperkirakan situasi kemanusiaan semakin memburuk secara signifikan.[[14]](#footnote-14)

1. **Praktek Penanganan Pengungsi Diberbagai Negara**
2. **Penanganan Pengungsi Irak di Amerika**

Liga pernah mengeluarkan resolusi agar negara-negara berpenduduk mayoritas Islam memiliki sebuah cara pandang baru terhadap penanganan pengungsi, khususnya penanganan pengungsi asal Irak. Amerika dan beberapa negara yang tergabung di NATO harus juga mengambil bagian dalam penanganan pengungsi asal Irak. Kegiatan agresi militer ke Irak dengan segala dampak susulan yang seharusnya sudah diperhitungkan para ahli strategis perang. Negara Libya, Mesir, Syiria dan Jordania yang kebetulan secara berdekatan dengan Irak, harus menampung para pengungsi asal Irak tersebut. Upaya Amerika Serikat untuk membantu memulangkan kembali para pengungsi ke Irak berjalan sangat lambat dan tidak didukung biaya yang memadai. Pemerintah Amerika juga mengabaikan negara Suriah yang selama ini menjadi negara penampung terbesar pengungsi Irak serta orang-orang yang terusir secara paksa dari negeri itu. Menurut data, sekitar 2,4 jta rakyat Irak terpaksa meninggalkan negara mereka sejak invasi Amerika pada tahun 2003. Pengungsi tersebut telah menimbulkan krisis di Suriah yang menampung sebanyak 1,4 juta serta Yordania yang menampung sebanyak 750ribu pengungsi.

UNHCR melaporkan bahwa sekitar 2 juta warga Irak lainnya telah terusir secara paksa, meski mereka berada dalam wilayah negara itu. Pemerintah Amerika pernah mengumumkan rencana tahun fiskal 2008 untuk menerima sebanyak 12ribu pengungsi asal Irak. Dari 200ribu pengungsi yang telah didaftar pemerintah Amerika serta lembaga PBB yang mengurusi pengungsi di Suriah, Yordania, dan Lebanon sebanyak 11ribu diantaranya telah diseleksi utnuk penyerahan dari lembaga PBB kepada lembaga-lembaga pemerintah Amerika. Upaya Amerika untuk menampung pengungsi Irak berjalan lamban karena minimnya anggaran. Disamping itu, kelambanan juga terjadi karena pengungsi harus melalui proses wawancara, pemeriksaan kesehatan, dan keamanan dengan UNHCH dan pemerintah Amerika. Proses tersebut dapat memakan waktu satu tahun.[[15]](#footnote-15)

1. **Penanganan Pengungsi di Perancis**

Upaya Perancis dalam penanganan pengungsi di camp Calais tidak optimal. Sebuah delegasi Dewan Eropa mengunjungi Camp tersebut. UHCR menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah Perancis tidak memenuhi standar. Komisaris Ham Dewan Eropa telah mengamati dan memeriksa keadaan di Camp pengungsi tersebut. Laporan Frank Reinout menyebutkan bahwa sejak tahun 1990, kota pesisir Calais telah menjadi penarik bagi para pendatang. Kota tersebut jadi tempat pertemuan pendatang dan pencari suaka asal Afrika, Timur Tengah dan Asia. Sebagian besar, berasal dari Afghanistan dan Irak dalam perjalanan menuju Inggris. Secara diam-diam mereka jadi penumpang gelap truk-truk yang melintas terowongan bawah kanal.

Arus pengungsian begitu besar sampai-sampai Palang merah membuka hangar di Sangatte untuk menampung para pengungsi. Tiga tahun lalu tempat tersebut ditutup pemerintah Perancis. Kemudian muncullah tenda-tenda seadanya yang didirikan diantara pepohonan didekat Calais. Disitu juga berkumpul ratusan pengungsi. Tenda-tenda tersebut pernah dibersihkan oleh pemerintah. Namun para pengungsi kembali muncul ditempat lain dikota itu. Pemerintah sejak itu memilih cara penaganan tetap yaitu menyapu bersih pengungsi dari kota. Juru bicara UNHCR di Paris menyebutkan bahwa strategi membokar camp-camp ini dan mencegah mereka mendirikan tenda, polisi datang mengambil selimut atau benda-benda lainnya serta membuangnya. Menurut pihak UNHCR, tindakan tersebut bukanlah pendekatan yang benar.

Dikalangan pendatang yang diusir juga terdapat pencari suaka dan mereka berhak menunggu keputusan atas permohonan suaka mereka di Perancis. Secara structural, Calais kekurangan tempat penampungan yang memadai. Ini terutama terjadi pada anak-anak, diantara para pengungsi terdapat banyak anak-anak dibwah umur yang tidak mempunyai pendamping. Mereka dibawa ke tempat penampungan. Namun tempat tersebut sangatlah tidak memadai. Pusat penampungan anak itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak asing ini. Mereka tidak memiliki orang yang mampu berbicara bahasa anak-anak ini. Mereka tidak memiliki psikolog yang berpengalaman menghadapi anak-anak pengungsi. Akibatnya, sebagian besar anak meninggalkan tempat tersebut, padahal mereka baru sehari disana. Mereka tdiak ditahan, jadi bebas untuk pergi.

Perancis telah menganggap Calais bermasalah dengan pendatang gelap, pendatang gelap harus keluar dari negeri itu. Itulah kebijakannya tetapi situasi para pendatang ini sangat kompleks sebagian melarikan diri dari kekerasan negara mereka. Baru sejak tahun lalu, menyusul tekanan dari UNHCR, terbuka peluan untuk memohon suaka di Calais. Satu kelompok pendatang telah mendapat ijin tinggal. Ini membuktikan bahwa UNHCR benar terdapat juga pengungsi politik di Calais yang harus diperlakukan sebagai pengungsi.

Menurut UNHCR Calais mencerminkan sebuah contoh menyedihkan mengenai kebijakan pengungsi Eropa yang macet. Negara-negara Uni Eropa mengirim para pengungsi atau dokumen mengenai mereka ke negara pertama tempat mereka menginjakkan kaki di Eropa. UNHCR mencontohkan, misalnya banyak pendatang Calais yang dirujuk ke Yunani. Pada saat dokumen mereka diproses disana, para pengungsi ini menunggu di tenda-tenda di Calais. Namun tenda-tenda itu dibersihkan oleh polisi.

UNHCR menyebutkan bahwa sistem suaka di Yunani tidaklah adil. Orang Irak yang memohon suaka di Yunani misalnya, hampir tidak pernah mendapatkan ijin tinggal. Tetapi di Finlandia atau Swedia sebagian besar orang Irak mendapatkan ijin tinggal. Bagaimana perbedaan ini bisa dijelaskan. UNHCR menyimpulkan bahwa kebijakan suaka Eropa tidak berfungsi baik. Para pengungsi sendiri menyaksikan hal itu disemua negara Eropa.[[16]](#footnote-16)

1. Lenczowski, George.1993. Timur Tengah di Kancah Dunia. (Terjemahan : Drs. Asgar Bixby) (Bandung : Sinar Baru Algensindo) hal. 218. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid., [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid., hal 229. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., hal 232-233. [↑](#footnote-ref-5)
6. Widodo, Ardianto. 2015. Kepentingan Suriah Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Lebanon (2008) . Skripsi PDF. (Pekanbaru: FISIP UNSRI) hal.1-2 . [↑](#footnote-ref-6)
7. Nerguizian, Aram.2014. The Struggle For The Levant Geopolitical Battles and The Quest For Stability. PDF. (CSIS) hal. 185-186. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dr Christina Lin. 2015. Syrian Buffer Zone – Turkey-Qatar Pipeline. Issue No. 367 Aug 2015. (Germany: The Institute for Strategic, Political, Security and Economic Consultancy (ISPSW)). Hal.2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., hal 3-5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wakim, Jamal. 2012. Geopolitic Dimension of Syiria Conflict. Foreign Policy Journal. Hal 8-9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi,* hal. 75. [↑](#footnote-ref-11)
12. Riza Shibudi, *Menyandera Timur Tengah* ( Hikmah Publishing House, 2007) hal. 34. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi,* hal. 85. [↑](#footnote-ref-13)
14. Asseburg, Muriel Dr. 2013*. Syiria’s Civil War* : *Geopolitical Implication and scenaios*. Report. (Berlin :German Institute for International and Security Affairs (SWP)) hal. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. (Jakarta: Sinar grafika) Hal 141- 142. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hal 14-144 [↑](#footnote-ref-16)